

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Kedaulatan Rakyat

Wilayah: Kabupaten Brebes

Halaman 12

Djoko Pastikan Tak Ganggu Pembangunan

► Pemkab Brebes Bakal Beli 11 Mobil Dinas Baru Senilai Rp 4,56 Miliar

BREBES, TRIBUN - Pemkab Brebes akan melakukan pengadaan mobil dinas untuk para pejabat setingkat kepala dinas dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Padahal, masih ada 55.296 rumah warga yang tak layak huni dan belum tertangani hingga saat ini.

Informasi yang dihimpun Tribun Jateng, total sebanyak 11 mobil dinas baru itu akan memakan anggaran mencapai Rp 4,56 miliar. Jumlah itu meliputi delapan mobil Toyota Innova Reborn untuk pejabat tingkat kepala dinas, dan tiga mobil Toyota Fortuner untuk pejabat jajaran Forkopimda.

Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DP-PKAD) Kabupaten Brebes, Subandi membenarkan rencana pembelian mobil dinas baru itu.

STORY HIGHLIGHTS

- Sebanyak 11 mobdin baru yang akan memakan anggaran Rp 4,56 miliar itu meliputi delapan mobil Toyota Innova Reborn dan tiga mobil Toyota Fortuner.
- Pengadaan mobdin baru itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan dan menjaga mobilisasi dengan kondisi medan dan wilayah Brebes yang cukup luas.
- Pengadaan mobdin baru itu sudah dialokasikan pada anggaran perubahan 2019, dan dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan.

"Iya, belanja mobdin ini masuk dalam anggaran perubahan tahun ini," katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (30/8).

Bupati Brebes, Idza Priyanti, enggan menjawab saat diwawancara. Ia justru melemparkan kepada sekda. Saat dikonfirmasi, Sekda Brebes, Djoko Gunawan menuturkan, pengadaan mobil dinas baru dialokasikan pada anggaran perubahan 2019.

Menurut dia, pengadaan mobil dinas itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan dan men-

jaga mobilisasi dengan kondisi medan dan wilayah Brebes yang cukup luas. Kendati demikian, ia menjamin pengadaan mobil dinas tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan.

"Kalau jumlah alokasi anggaran bagi pengadaan mobil ini saya kurang hapal. Tapi yang jelas bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi terkait kinerja dinas. Selain untuk dinas, pengadaan kendaraan dinas ini juga diperuntukan bagi mobilisasi Forkompinda," jelasnya.

Meski pengadaan mobil dinas membutuhkan anggaran yang cukup besar, Djoko menuturkan, Pemkab Brebes tetap memprioritaskan program pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, di antaranya penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut, penanganan RTLH menggunakan beberapa sumber anggaran. Selain APBD, juga menggunakan anggaran bantuan dari Pemprov Jateng dan corporate social responsibility (CSR) pihak ketiga. "Jadi, terobosan-terobosan kaitannya dengan penganggaran tetap kami lakukan," tandasnya.

Terkait dengan RTLH, data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim) Kabupaten Brebes mencatat, hingga 2019 masih ada 55.296 unit rumah yang termasuk kategori

tak layak huni. Jumlah itu tersebar di 17 kecamatan yang ada di Brebes.

Dari total 55.296 unit RTLH itu, pada 2017 lalu melalui APBD Pemkab Brebes baru menangani sebanyak 237 unit. Kemudian, pada 2018 hanya sebanyak lima unit, dan pada 2019 direncanakan sebanyak 1.000 unit.

"Berdasarkan data BDT (basis data terpadu-Red), saat ini masih ada sebanyak 55.296 unit RTLH di Brebes," kata Kepala Disperwaskim Kabupaten Brebes, Sutaryono.

Terkendala anggaran

Penanganan RTLH itu, menurut dia, masih terkendala keterbatasan anggaran daerah, sehingga kurang maksimal. Sehingga, dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga, termasuk kalangan swasta melalui dana CSR dan instansi lain.

"Penanganan RTLH ini butuh intervensi semua pihak, baik dari swasta melalui dana CSR dan instansi lain," terangnya.

Sutaryono menyatakan, selain bersumber dari APBD, penanganan RTLH itu selama ini juga dibantu dari anggaran APBD Pemprov Jateng dan APBN. Terbukti, jumlah RTLH dari semula sebanyak 63.000 unit, kini tersisa 55.296 unit.

Dari jumlah itu, untuk bisa ditangani seluruhnya secara bertahap dibutuhkan waktu 10 tahun ke depan, atau hingga tahun 2032, dengan catatan, setiap tahun RTLH yang harus ditangani sebanyak 5.000 unit.

"Untuk tahun depan kami mengusulkan sebanyak 3.176 unit untuk bisa ditangani. Target kami pada 2032 seluruh RTLH ini bisa tertangani," tandasnya. (nal)